

Optimalisasi Kompetensi Kerja Melalui Program Praktek Kemahiran Hukum II bagi Mahasiswa Magang di Kanwil Kemenkum Kalteng

Optimization of Work Competence Through the "Legal Proficiency Practice II" for Internship Students at the Regional Office of The Ministry of Law in Central Kalimantan

Rizky Hairiana^{1*}, Almas Jaitun², Ahmad Sukma Nugraha³, Nadilla Oktaviany⁴, Nurul⁵,
Noor Adiyati⁶, Rafik Patrajaya⁷

¹⁻⁶Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

*Penulis korespondensi: kiki2212140029@iain-palangkaraya.ac.id¹

Article History:

Naskah Masuk: 21 Oktober 2025;

Revisi: 15 November 2025;

Diterima: 02 Desember 2025;

Terbit: 06 Desember 2025

Keywords: Legal Bureaucracy;
Legal Practice; Professional
Experience; Professional Identity;
Work Competencies

Abstract. The Legal Proficiency Practice Program II is an activity designed to connect the academic competence of students with the needs of work in legal institutions, one of which is the Regional Office of the Ministry of Law in Central Kalimantan. The main problem raised in this activity is how the optimization of student work competence can be achieved through direct involvement in the legal bureaucracy environment. The purpose is to provide a real professional experience, strengthen students' understanding of legal and administrative tasks, and form a professional identity as a prospective legal practitioner. The methods used include the placement of students with a rotation system in various work units for 30 days, observation of bureaucratic activities, involvement in substantive and administrative tasks. The implementation results show that the direct involvement of students in various work units can improve technical competencies, such as document management, meeting assistance, and information services, as well as develop non-technical competencies such as work ethics, communication, discipline, and time management. The internalization of PASTI values and the reflection process through the logbook also strengthens the formation of students' professional identity. Overall, the PKH II program is proven to be effective in optimizing the work competence of students and increasing their readiness to enter the world of the legal profession.

Abstrak

Program Praktek Kemahiran Hukum II merupakan kegiatan yang dirancang untuk menghubungkan kompetensi akademik mahasiswa dengan kebutuhan kerja di instansi hukum, salah satunya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. Permasalahan utama yang diangkat dalam kegiatan ini adalah bagaimana optimalisasi kompetensi kerja mahasiswa dapat dicapai melalui keterlibatan langsung dalam lingkungan birokrasi hukum. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman profesional yang nyata, memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai tugas-tugas hukum dan administrasi, serta membentuk identitas profesional sebagai calon praktisi hukum. Metode yang digunakan meliputi penempatan mahasiswa dengan sistem rotasi pada berbagai unit kerja selama 30 hari, observasi aktivitas birokrasi, pelibatan dalam tugas-tugas substantif dan administratif. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa keterlibatan langsung mahasiswa pada beragam unit kerja dapat meningkatkan kompetensi teknis, seperti pengelolaan dokumen, asistensi rapat, dan pelayanan informasi, sekaligus mengembangkan kompetensi nonteknis seperti etika kerja, komunikasi, kedisiplinan, dan manajemen waktu. Internalisasi nilai PASTI serta proses refleksi melalui logbook turut memperkuat pembentukan identitas profesional mahasiswa. Secara keseluruhan, program PKH II terbukti efektif dalam mengoptimalkan kompetensi kerja mahasiswa dan meningkatkan kesiapan mereka memasuki dunia profesi hukum.

Kata Kunci: Birokrasi Hukum; Identitas Profesional; Kompetensi Kerja; Pengalaman Profesional; Praktek Hukum

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara dengan sistem pemerintahan presidensial, dengan Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara menjalankan kekuasaan pemerintahannya dengan dibantu oleh menteri-menteri yang pengangkatan dan pemberhentiannya merupakan wewenang Presiden.(Arnita, 2021) Para menteri Negara membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementeriannya diatur dalam Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945.(Liu dkk., 2022) Perkembangan kelembagaan Kementerian di Indonesia mengalami dinamika signifikan, perubahannya mencerminkan respon pemerintah terhadap dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terus berkembang. Kementerian berfungsi sebagai alat utama Presiden dalam menjalankan pemerintahan, terutama dalam bidang perumusan kebijakan, pelayanan publik, dan pengawasan administratif.(Roziqin & Sofyhan, 2023)

Salah satunya dalam bidang hukum, dengan beberapa kali perubahan nomeklatur untuk menyesuaikan tugas dan fungsinya, yaitu berawal dari Departemen Kehakiman pada tahun 1945-1999, kemudian Departemen Hukum dan Perundang-undangan pada tahun 1999-2001, berubah lagi menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada 2001-2004, kemudian menjadi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 2004-2009 (Citrawati dkk., 2020), lalu menjadi Kementerian Hukum dan HAM pada 2009-2024, dan terkini pada masa jabatan presiden ke-8 bapak Prabowo Subianto, dalam kabinet Merah Putih, Kemenkumham resmi berubah menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Kewarganegaraan yang ketiganya ini dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Kewarganegaraan.(Susilawati dkk., 2025) Perubahan ini didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian dalam artian mencabut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara beserta perubahannya. Dan untuk tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kemenkum secara khusus diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum yang ditetapkan pada tanggal 5 November 2024. (Indrayati, 2024)

Penataan ulang ini tidak hanya berdampak pada mekanisme kerja internal kementerian, tetapi juga membuka ruang bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk dunia pendidikan, yang memerlukan pemahaman baru mengenai dinamika kelembagaan tersebut. Perguruan tinggi menjadi langkah awal bagi para mahasiswa untuk mempersiapkan diri menuju kehidupan kerja profesional.(Supriyatno & Luailik, 2022) Persaingan dalam dunia kerja yang sudah semakin ketat, tentu menjadi tantangan bagi mahasiswa. Meningkatkan kompetensi diri,

baik soft skill maupun hard skill sangat dibutuhkan sehingga perlu untuk mendalami kedua hal tersebut.(Sugrainsi & Cerya, 2023)

UIN Palangka Raya, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum mempunyai mata kuliah khusus yaitu Praktik Kemahiran Hukum II (PKH II) yang merupakan penghubung antara pengetahuan akademik mahasiswa dan realitas kerja di instansi yang bergerak dalam pelayanan hukum, salah satunya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. Sebelumnya, ada pula Program Praktik Kemahiran Hukum I yang berfokus pada observasi dan praktik di ruang lingkup Pengadilan. PKH II sendiri berfokus pada lembaga pemerintah dan lembaga layanan hukum. Mahasiswa hukum yang merupakan agen perubahan (*agent of change*) diperlukan menjadi garda terdepan sebagai entitas terpelajar, berintelektualitas serta mempunyai kepribadian mulia.(Romadan, 2021)

Di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalteng, *silent curriculum* termanifestasi ketika mahasiswa magang menyerap norma perilaku profesional, memahami mekanisme hierarki organisasi, serta menginternalisasi kebiasaan kerja seperti ketepatan administrasi dan kepatuhan terhadap prosedur. Pembelajaran informal memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung transisi mahasiswa menuju identitas profesional.(Brotsky dkk., 2024) *Silent curriculum* sendiri merupakan norma, nilai, sikap, dan kebiasaan yang dipelajari mahasiswa magang melalui observasi, interaksi, dan pengalaman langsung di lingkungan. Sifat *silent curriculum* sendiri tidak terucapkan, tidak ada kelas khusus untuk mempelajarinya.(Al-Karasneh & Jubran, 2013) Keterlibatan dalam tugas nyata baik rutin maupun tugas yang memberikan kebaruan, meningkatkan *self-perceived learning* dan pertumbuhan *soft skills* yang relevan untuk optimalisasi kompetensi kerja.(Ufia dkk., 2024).

Dengan pengalaman yang dilakukan mahasiswa magang, selain meningkatkan kompetensi teknis, juga memengaruhi minat mahasiswa untuk berkarir di lembaga pemerintahan atau lembaga layanan hukum, karena mahasiswa merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan dunia kerja setelah mengikuti program PKH II.(Alam & Susti, 2025) Melalui interaksi langsung dengan para praktisi hukum, mahasiswa magang dapat memperoleh wawasan mengenai kebutuhan dan tantangan nyata yang dihadapi, serta mengidentifikasi peluang-peluang karir yang sesuai dengan kompetensi mereka.(Afrilia dkk., 2024) Dengan bekal teori dan wawasan yang dipelajari di bangku perkuliahan, diharapkan hal tersebut menjadi modal bagi mahasiswa dalam pelaksanaan PKH II. Tentu dengan kemungkinan besar munculnya persoalan baru yang akan dihadapi dan diselesaikan ketika terjun di dunia kerja. (Gohae, 2020)

Namun, meskipun terbukti memberikan manfaat, tentu terdapat tantangan-tantangan

bagi mahasiswa magang misalnya kecenderungan tugas yang diberikan sifatnya administratif tanpa terlibat langsung dalam aktivitas di tempat magang, ini dapat menghambat dalam mengoptimalkan kompetensi kerja mahasiswa magang.(Ufia dkk., 2024) Oleh karena itu, penelitian ini untuk meneliti lebih lanjut bagaimana program magang Praktik Kemahiran Hukum II di Kanwil Kemenkum Kalteng dapat menjadi wadah untuk mengoptimalkan kompetensi kerja mahasiswa magang.

2. METODE

Pelaksanaan program Praktek Kemahiran Hukum II (PKH II) bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya. Pelaksanaan PKH II ini dimulai pada Senin, 8 September 2025 hingga Senin, 20 Oktober 2025. Beberapa langkah dalam metode yang digunakan, yaitu mulai dari rancangan awal di mana kelompok PKH II dibentuk oleh Ketua Program Studi Hukum Tata Negara serta Ketua Pelaksana PKH II berdasarkan minat Mahasiswa terhadap lembaga yang diinginkan. Kemudian diadakan pertemuan sebagai bentuk persiapan melaksanakan PKH II dan pembagian pembimbing dosen lapangan. Lalu tahap pelaksanaan yang diawali dengan pengantaran mahasiswa magang oleh Dosen Pembimbing PKH II pada Senin, 8 September 2025. Dan diakhiri, dengan penjemputan kembali mahasiswa magang oleh Dosen Pembimbing PKH pada Senin, 20 Oktober 2025. Pelaksanaan PKH II berlangsung selama 30 hari kerja dengan jadwal yang tentu saja mengikuti ketentuan di Kanwil Kemenkum Kalteng yaitu pada hari Senin-Kamis pukul 07.30 WIB-16.00 WIB dan khusus hari Jumat dilaksanakan secara daring atau disebut *Work From Anywhere* (WFA).



Gambar 1. Pengantaran Mahasiswa PKH II.



Gambar 2. Penjemputan dan Penyerahan Plakat.

3. HASIL

Kanwil Kemenkum Kalteng secara reguler menerima mahasiswa magang dan menjadi tempat praktik bagi program-program akademik seperti PKH II. Kanwil Kemenkum Kalteng memberikan kesempatan untuk mahasiswa magang terlibat langsung dalam beragam aktivitas kerja, seperti pengelolaan dokumen hukum dan administrasi, pelayanan informasi kepada masyarakat, serta asistensi teknis di berbagai divisi fungsional.

Mekanisme PKH II yang penulis laksanakan di Kanwil Kemenkum Kalteng menerapkan *rolling system* selama enam minggu, yang menempatkan mahasiswa secara bergiliran pada beberapa unit kerja, antara lain bagian Keuangan dan BMN, bagian Program dan Pelaporan, bagian Humas, Teknologi Informasi dan Reformasi Birokrasi, bagian Kekayaan Intelektual, bagian Administrasi Hukum Umum, bagian Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan bagian Badan Strategi Kebijakan Hukum. Pola rotasi ini tidak hanya memberikan paparan menyeluruh terhadap ragam fungsi birokrasi, tetapi juga membentuk ruang belajar informal yang kuat dan memfasilitasi internalisasi nilai-nilai profesionalitas melalui pengalaman langsung.

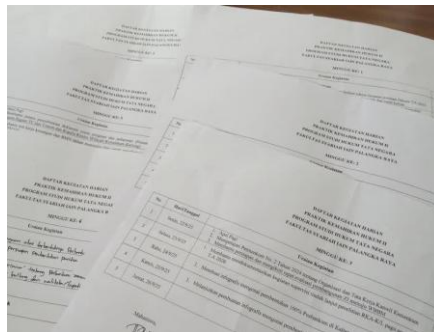
Memasuki masa magang, mahasiswa tentu menghadapi tantangan-tantangan tersendiri karena mereka mulai mengalami transisi identitas dari seorang pelajar akademik menjadi seseorang yang terlibat dalam pekerjaan hukum. Sebagaimana penulis melaksanakan PKH II di Kanwil Kemenkum Kalteng, perubahan pada diri penulis muncul karena kami mulai menghadapi tugas yang nyata dan berinteraksi dengan para pegawai yang sudah berpengalaman. Pengalaman langsung di Kanwil Kemenkum Kalteng menjadi titik awal perubahan identitas profesional penulis sebagai mahasiswa, terutama ketika ada tuntutan untuk ikut serta mengambil keputusan dan memahami tanggung jawab yang sebelumnya hanya penulis pelajari melalui teori.

Selama 30 hari melaksanakan PKH II, mahasiswa magang tidak sekedar melihat pekerjaan birokrasi tetapi juga ikut mengerjakan beberapa tugas seperti penyusunan dokumen,



Tentu selama melaksanakan PKH II, tidak lepas dari pembimbing baik dosen dari kampus maupun pembimbing di Kanwil Kemenkum Kalteng. Keduanya memiliki peran besar dalam proses perubahan identitas yang penulis rasakan ketika pelaksanaan. Bukan sekedar memberikan tugas, tapi mahasiswa magang juga diarahkan bagaimana etika kerja, cara berkomunikasi, dan bagaimana mengelola waktu sehingga penulis lebih optimal dalam memahami dunia kerja, terutama di Kanwil Kemenkum Kalteng itu sendiri.

Pengalaman PKH II ini membangun cara mahasiswa magang memandang dirinya menjadi calon praktisi hukum, di mana identitas sebagai praktisi tidak tercipta dalam satu hari tetapi dari pengalaman-pengalaman yang membentuk cara berpikir dan cara bekerja. Proses refleksi atas pengalaman PKH II seperti jurnal harian atau *logbook* dan diskusi kelompok membantu penulis memahami perubahan diri dan menegaskan identitas profesional yang sedang berproses untuk tumbuh.



Gambar 7. Salah Satu Logbook Mahasiswa PKH II.

Melalui keterlibatan langsung seperti ini, mahasiswa mengamati pentingnya kompetensi emosional seperti empati, kesabaran, dan kemampuan mengelola situasi yang bersifat sensitif. Selain itu, nilai-nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif) Kanwil Kemenkum Kalteng yang berdampak pada integritas pegawai menjadi model pembelajaran etis bagi mahasiswa.

Selain ikut terlibat langsung dalam beragam aktivitas kerja, penulis sebagai mahasiswa magang PKH II juga diikutsertakan saat kegiatan-kegiatan rutin di Kanwil Kemenkum Kalteng.



Gambar 8. Apel Senin.



Gambar 9. Senam Pagi Kamis.

4. KESIMPULAN

Program Praktek Kemahiran Hukum II (PKH II) di Kanwil Kemenkum Kalteng memberikan pengalaman langsung yang memperkuat kompetensi kerja mahasiswa melalui keterlibatan pada berbagai unit birokrasi. Melalui sistem rotasi, mahasiswa memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai alur pelayanan hukum, administrasi, serta mekanisme kerja instansi, sekaligus mempraktikkan tugas-tugas teknis seperti penyusunan dokumen, asistensi rapat, dan pelayanan informasi.

Pengalaman empiris tersebut turut membentuk identitas profesional mahasiswa sebagai calon praktisi hukum melalui internalisasi etika kerja, nilai PASTI, serta bimbingan dari pembimbing instansi dan kampus. Secara keseluruhan, hasil pelaksanaan PKH II menunjukkan bahwa program ini efektif dalam mengoptimalkan kompetensi teknis dan nonteknis mahasiswa serta meningkatkan kesiapan mereka memasuki dunia kerja di bidang hukum dan birokrasi.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. dan rasa terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh keluarga besar Kanwil Kemenkum Kalteng yang telah menerima penulis dengan baik, memberikan ilmu yang bermanfaat, dan kenangan yang tidak terlupakan. Dan tak lupa pula, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota kelompok PKH II yang telah berkontribusi baik tenaga maupun pikiran dalam pengabdian berbentuk Praktek Kemahiran Hukum II ini. Semoga segala usaha yang dikerjakan membuahkan hasil

yang bermanfaat dan menjadi sumber pahala bagi teman-teman semua, aamiin.

DAFTAR REFERENSI

- Afrilia, C., Anggusti, M., & Panjaitan, Y. T. R. (2024). Kontribusi magang terhadap pengembangan keterampilan hukum (Studi kasus di Kantor Pengacara Tri Wira Justitia). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 7(2), 634–640. <https://doi.org/10.34007/jehss.v7i2.2417>
- Alam, R., & Susti, N. (2025). Pengaruh pengalaman magang, informasi kerja, dan keahlian akuntansi terhadap kesiapan kerja mahasiswa akuntansi. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 1–20.
- Al-Karasneh, S., & Jubran, A. (2013). Classroom leadership and creativity: A study of social studies and Islamic education teachers in Jordan. *Creative Education*, 4(10), 651–662. <https://doi.org/10.4236/ce.2013.410094>
- Arnita. (2021). Sistem pemerintahan presidensial dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 10(2), 189–202. <https://doi.org/10.56196/jta.v10i02.163>
- Brodsky, A., Rausch, A., & Seifried, J. (2024). Informal learning in business internships in higher education: Findings from a diary study. *Vocations and Learning*, 17(3), 433–458. <https://doi.org/10.1007/s12186-024-09349-y>
- Citrawati, N. K., Husni, L., & Risnain, M. (2020). Kedudukan dan kewenangan pengelolaan rumah tahanan negara (RUTAN) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 8(2), 425–438.
- Gohae, A. S. (2020). Pengalaman magang, minat kerja dan pengaruhnya terhadap kesiapan kerja mahasiswa akuntansi. *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 4(3), 1954–1964. <https://doi.org/10.31955/mea.v4i3.748>
- Indrayati, R. (2024). Pemisahan Kementerian Hukum dan HAM pada pemerintahan baru: Dampak dan tantangan dalam sistem pemerintahan. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1), 183–216. <https://doi.org/10.55292/scv78849>
- Liu, C. N., Pondaag, H., & Umboh, K. Y. (2022). Kedudukan kementerian negara dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. *Lex Privatum*, 10(5).
- Romadan, S. (2021). Peran pendidikan tinggi hukum dan urgensi mahasiswa dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan. *CREPIDO*, 3(1), 33–44. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.1.33-44>
- Roziqin, R., & Sofyhan, I. (2023). Kedudukan kelembagaan kementerian negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal De Jure*, 15(1), 33–45. <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v15i1.794>
- Sugraini, T., & Cerya, E. (2023). Pengaruh persepsi mahasiswa terkait proses pembelajaran dan praktik pelaksanaan magang terhadap pengembangan soft skill mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Padang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 17947–17954. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.9206>
- Supriyatno, H., & Luailik, E. (2022). Peningkatan kompetensi melalui program magang (Studi kasus di Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya). *Al-Maktabah: Jurnal Kajian*

Ilmu dan Perpustakaan, 7(1), 53–69. <https://doi.org/10.29300/mkt.v7i1.6398>

- Susilawati, P. D., Zaqy, A. P., Maheswari, I. G. A. A. P., Nurcahya, I. W. D., & Wicaksono, M. M. (2025). Batasan kewenangan kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali pasca restrukturisasi kelembagaan pada Kemenkumham. *Jurnal Media Akademik*, 3(7), 1–19. <https://doi.org/10.62281>
- Ufia, S., Nugroho, A. D., & Wahjoedi, T. (2024). Meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui program magang sebagai upaya peningkatan hard skill dan soft skill. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 1(2), 39–47. <https://doi.org/10.59613/97dmmj73>